

PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN ANTAR KECAMATAN DI KABUPATEN BANYUMAS, 1993-2000

Sutarno

Alumnus Magister Ekonomika Pembangunan UGM

Mudrajad Kuncoro

Fakultas Ekonomi, Universitas Gadjah Mada

Abstract

This research attempts to identify the nature of economic growth and to understand disparity among of sub-districts in Banyumas regency. The tools of analysis are Klassen typology, Williamson index, entropy Theil index, trend and Pearson correlation.

Klassen typology shows that Banyumas sub-district can be classified into four types: high growth and high income, high income but low growth, high growth but low income, low growth and low income. Based on Williamson index and entropy Theil index, we found that disparity of gross regional domestic product per capita among sub-districts in Banyumas tended to increase over the period of 1993-2000. More importantly, our findings confirmed that Kuznets hypothesis could be found in Banyumas. Indeed, there has been a negative correlation between Williamson index or entropy Theil index with GRDP growth.

PENDAHULUAN

Pembangunan dalam lingkup negara secara spasial tidak selalu berlangsung sistemik. Beberapa daerah mencapai pertumbuhan cepat, sementara beberapa daerah lain mengalami pertumbuhan yang lambat. Daerah-daerah tersebut tidak mengalami kemajuan yang sama disebabkan oleh karena kurangnya sumber-sumber yang dimiliki, adanya kecenderungan peranan modal (investor) memilih daerah perkotaan atau daerah yang telah memiliki fasilitas seperti prasarana perhubungan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, perbankan, asuransi, juga tenaga kerja yang trampil di samping itu adanya ketimpangan redistribusi pembagian pendapatan dari Pemerintah Pusat kepada daerah (Tim P4N-UGM dan BAPPEDA Tingkat I Jawa Tengah, 1997 :1-2).

Dari studi mengenai wilayah Jawa Tengah yang dilakukan oleh Tim P4N – UGM yang bekerja sama dengan Badan Pe-

rencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Propinsi Jawa Tengah pada evaluasi paruh waktu Pelita VI menyatakan bahwa Kabupaten Banyumas menurut tipologi Klassen termasuk kabupaten yang masih tertinggal atau masuk kuadran IV, yaitu pendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonominya masih di bawah dari pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Tengah.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan yang diukur dengan produk domestik regional bruto (PDRB) selama lima tahun (1996–2000) mengalami fluktuasi, terlebih pada tahun 1998 terjadi penurunan PDRB akibat krisis ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi yang pada tahun 1996 lebih 4%, pada tahun 1998 turun menjadi minus 6,8 % walaupun pada tahun 2000 perekonomian sudah tumbuh positif 4,03 % atas dasar harga konstan tahun 1993, hal tersebut dapat dilihat pada table 1.

Tabel 1. Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan 1993
Propinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Banyumas, 1996–2000

Tahun	Jawa Tengah		Banyumas	
	PDRB (000.000,00)	Pertumbuhan (%)	PDRB (000,00)	Pertumbuhan (%)
1996	41.862.203,72	7,3	1.018.612.908	4,26
1997	43.129.838,90	3,01	1.055.339.404	3,61
1998	38.065.273,35	-11,74	983.564.125	-6,80
1999	39.394.513,74	3,49	988.804.675	0,53
2000	40.932.538,43	3,90	1.028.604.674	4,03
	Rata-rata	1,192	Rata-rata	1,126

Sumber: 1. BPS, PDRB Propinsi Jawa Tengah, beberapa terbitan
2. BPS, PDRB Kabupaten Banyumas, beberapa terbitan

Pertumbuhan negatif yang terjadi di Kabupaten Banyumas maupun di Propinsi Jawa Tengah merupakan dampak dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997. Dampak krisis tersebut lebih besar melanda Propinsi Jawa Tengah dari pada di Kabupaten Banyumas. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan negatif yang lebih besar dari pada di Kabupaten Banyumas, di mana Propinsi Jawa Tengah terjadi pertumbuhan -11,74 sedangkan di Kabupaten Banyumas hanya -6,8.

Perbedaan tingkat pembangunan akan membawa dampak perbedaan tingkat kesejahteraan antardaerah yang pada akhirnya menyebabkan ketimpangan regional antardaerah semakin besar. Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka diduga terjadi pertumbuhan PDRB dan pelaksanaan pembangunan yang tidak merata tiap kecamatan sesuai dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing kecamatan. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mengambil kebijakan dalam pengalokasian dana pembangunan kepada kecamatan sesuai kondisi alamnya yang dapat dikembangkan.

Penelitian ini bertujuan: *pertama*, untuk mengklasifikasikan kecamatan berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita. *Kedua*, untuk menghitung ketimpangan antarkecamatan. *Ketiga*, untuk membuktikan hipotesis Kuznet tentang U terbalik apakah berlaku di Kabupaten Banyumas. Untuk mencapai tujuan tersebut alat yang digunakan adalah tipologi Klassen, indeks ketimpangan Williamson, indeks ketimpangan entropy Theil, trend dan korelasi Pearson.

PERTUMBUHAN EKONOMI

Menurut pandangan ekonom klasik, Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus dan John Straurt Mill, maupun ekonom neo klasik, Robert Solow dan Trevor Swan, mengemukakan bahwa pada dasarnya ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu (1) jumlah penduduk, (2) jumlah stok barang modal, (3) luas tanah dan kekayaan alam, dan (4) tingkat teknologi yang digunakan (Sukirno, 1985: 275). Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau berkembang apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi dari pada apa yang dicapai pada masa sebelumnya.

Menurut Boediono (1985: 1) pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *output* per kapita dalam jangka panjang. Peneanan pada proses karena proses mengandung unsur dinamis. Para teoritis ilmu ekonomi pembangunan masa kini, masih terus menyempurnakan makna, hakikat dan konsep pertumbuhan ekonomi. Para teoritis tersebut menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dengan pertambahan PDB dan PDRB saja, tetapi juga diberi bobot yang bersifat immaterial seperti kenikmatan, kepuasan dan kebahagiaan dengan rasa aman dan tentram yang dirasakan masyarakat luas (Arsyad, 1999: 141).

Kuznets (1955) yang telah berjasa besar dalam memelopori analisis pola-pola pertumbuhan historis di negara-negara maju mengemukakan pada tahap-tahap pertumbuhan awal, distribusi pendapatan cenderung memburuk, namun pada tahap-tahap berikutnya hal itu akan membaik. Observasi inilah yang kemudian dikenal secara luas sebagai konsep kurva Kuznets U terbalik (Todaro, 2000:207).

Arsyad (1999: 147–148) menyebutkan bahwa teori kutub pertumbuhan yang dipopulerkan oleh ekonom Perroux (1970) menyatakan bahwa pertumbuhan tidak muncul di berbagai daerah pada waktu yang sama. Pertumbuhan hanya terjadi di beberapa tempat yang merupakan pusat (kutub) pertumbuhan dengan intensitas yang berbeda.

Untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi daerah dapat digunakan tipologi Klassen sebagai alat analisis. Sjafrizal (1997: 27-38) menjelaskan bahwa dengan menggunakan alat analisis ini dapat diperoleh empat klasifikasi pertumbuhan masing-masing daerah yaitu daerah pertumbuhan cepat (*rapid growth region*), daerah tertekan (*retarded region*), daerah sedang bertumbuh (*growing region*) dan daerah relatif tertinggal (*relatively backward region*). Kuncoro dan

Aswandi (2002: 25-43) menggunakan alat analisis ini untuk mengklasifikasikan wilayah Propinsi Kalimantan Selatan menjadi ke dalam empat kelompok, yaitu (a) *Low growth, high income*, (b) *high growth, high income*, (c) *high growth, low income*, dan (d) *low growth, low income*.

KETIMPANGAN EKONOMI ANTAR DAERAH

Williamson (1965) meneliti hubungan antar disparitas regional dengan tingkat pembangunan ekonomi, dengan menggunakan data ekonomi yang sudah maju dan ekonomi yang sedang berkembang, ditemukan bahwa selama tahap awal pembangunan, disparitas regional menjadi lebih besar dan pembangunan terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu. Pada tahap yang lebih matang dari pertumbuhan ekonomi tampak adanya keseimbangan antar daerah dan disparitas berkurang dengan signifikan.

Untuk mengetahui ketimpangan pembangunan antarkecamatan yang terjadi di Kabupaten Banyumas, 1993-2000 dapat dianalisis dengan menggunakan indeks ketimpangan regional (*regional in equality*) yang dinamakan indeks ketimpangan Williamson (Sjafrizal, 1997: 31):

$$IW = \frac{\sqrt{\sum (Y_i - Y)^2 f_i / n}}{Y} \quad (1)$$

Di mana :

Y_i = PDRB per kapita di kecamatan i

Y = PDRB per kapita rata-rata Kabupaten Banyumas

f_i = jumlah penduduk di kecamatan i

n = jumlah penduduk Kabupaten Banyumas

Masalah ketimpangan ekonomi antar daerah tidak hanya tampak pada wajah ketimpangan perekonomian Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa melainkan juga antar Ka-

wasan Barat Indonesia (Kabarin) dan Kawasan Timur Indonesia (Katimin). Berbagai program yang dikembangkan untuk menjembatani ketimpangan antardaerah selama ini ternyata belum mencapai hasil yang memadai. Alokasi penganggaran pembangunan sebagai instrumen untuk mengurangi ketimpangan ekonomi tersebut tampaknya perlu lebih diperhatikan di masa mendatang. Strategi alokasi anggaran itu harus mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menjadi alat mengurangi kesenjangan/ketimpangan regional (Majidi: 1997:1).

Proses akumulasi dan mobilisasi sumber-sumber, berupa akumulasi modal, ketrampilan tenaga kerja, dan sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah merupakan pemicu dalam laju pertumbuhan ekonomi wilayah yang bersangkutan. Adanya heterogenitas dan beragam karakteristik suatu wilayah menyebabkan kecenderungan terjadinya ketimpangan antardaerah dan antarsektor ekonomi suatu daerah. Bertitik-tolak dari kenyataan itu, Ardani (1992:3) mengemukakan bahwa kesenjangan/ketimpangan antar daerah merupakan konsekuensi logis pembangunan dan merupakan suatu tahap perubahan dalam pembangunan itu sendiri.

Menurut Myrdal (1957) perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antar daerah yang berlebihan akan menyebabkan pengaruh yang merugikan (*backwash effects*) mendominasi pengaruh yang menguntungkan (*spread effects*) terhadap pertumbuhan daerah, dalam hal ini mengakibatkan proses ketidakseimbangan. Pelaku-pelaku yang mempunyai kekuatan di pasar secara normal akan cenderung meningkat bukannya menurun, sehingga mengakibatkan ketimpangan antar daerah (Arsyard, 1999: 129).

Menurut Kuncoro (2001: 87), konsep entropi Theil dari distribusi pada dasarnya merupakan aplikasi konsep teori informasi dalam mengukur ketimpangan ekonomi dan

konsentrasi industri. Studi empiris yang dilakukan Theil dengan menggunakan indeks entropi menawarkan pandangan yang tajam mengenai pendapatan regional per kapita dan kesenjangan pendapatan, kesenjangan internasional dan distribusi produk domestik bruto dunia.

Untuk mengukur ketimpangan pendapatan regional bruto propinsi, Ying menggunakan indeks ketimpangan regional. Indeks ketimpangan regional Theil tersebut dapat dibagi/diurai menjadi dua subindikasi yaitu ketimpangan regional dalam wilayah dan ketimpangan regional antarwilayah atau regional (Ying, 2000: 60). Dengan menggunakan alat analisis indeks entropi Theil akan diketahui ada tidaknya ketimpangan yang terjadi di Kabupaten Banyumas. Rumus dari indeks entropi Theil adalah sebagai berikut (Ying, 2000:60):

$$I(y) = \sum (y_j / Y) x \log [(y_j / Y) / (x_j / X)] \quad (2)$$

Di mana:

$I(y)$ = indeks entropi Theil

y_j = PDRB per kapita kecamatan j

y = rata-rata PDRB per kapita Kabupaten Banyumas

x_j = jumlah penduduk kecamatan j

X = Jumlah penduduk Kabupaten Banyumas

Indeks ketimpangan entropi Theil memungkinkan untuk membuat perbandingan selama waktu tertentu. Indeks ketimpangan entropi Theil juga dapat menyediakan secara rinci dalam sub unit geografis yang lebih kecil, yang pertama akan berguna untuk menganalisis kecenderungan konsentrasi geografis selama periode tertentu; sedang yang kedua juga penting ketika kita mengkaji gambaran yang lebih rinci mengenai kesenjangan/ketimpangan spasial. Sebagai contoh kesenjangan/ketimpangan antardaerah dalam suatu negara dan antar sub unit daerah dalam suatu kawasan (Kuncoro, 2001: 87).

HASIL ANALISIS

Tipologi Klassen

Alat analisis tipologi Klassen digunakan untuk mengetahui klasifikasi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pendapatan atau produk domestik regional bruto per kapita daerah. Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-rata produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita sebagai sumbu horisontal, daerah dalam hal ini kecamatan yang diamati dapat dibagi menjadi empat klasifikasi/golongan, yaitu: daerah/kecamatan yang cepat maju dan cepat tumbuh (*high growth and high income*), daerah/kecamatan maju tapi tertekan (*high income but low growth*), daerah/kecamatan yang berkembang cepat (*high growth but low income*), dan daerah/kecamatan yang relatif tertinggal (*low growth and low income*) (Syafrizal, 1997: 27-38; Kuncoro dan Aswandi, 2002 : 27-43).

Dengan tipologi Klassen, kecamatan di Kabupaten Banyumas dibagi menjadi empat (4) klasifikasi (lihat gambar 1). Kecamatan Kalibagor, Banyumas, Ajibarang, Sokaraja, Purwokerto Selatan, Purwokerto Barat dan Purwokerto Timur termasuk kecamatan yang cepat maju dan cepat tumbuh. Kecamatan yang termasuk katagori kecamatan yang maju dan tumbuh cepat ini pada umumnya daerah yang maju baik dari segi pembangunan atau kecepatan pertumbuhan.

Kecamatan Wangon, Somagede, dan Baturaden, termasuk kecamatan maju tapi tertekan. Kecamatan ini adalah daerah/kecamatan yang relatif maju tetapi dalam beberapa

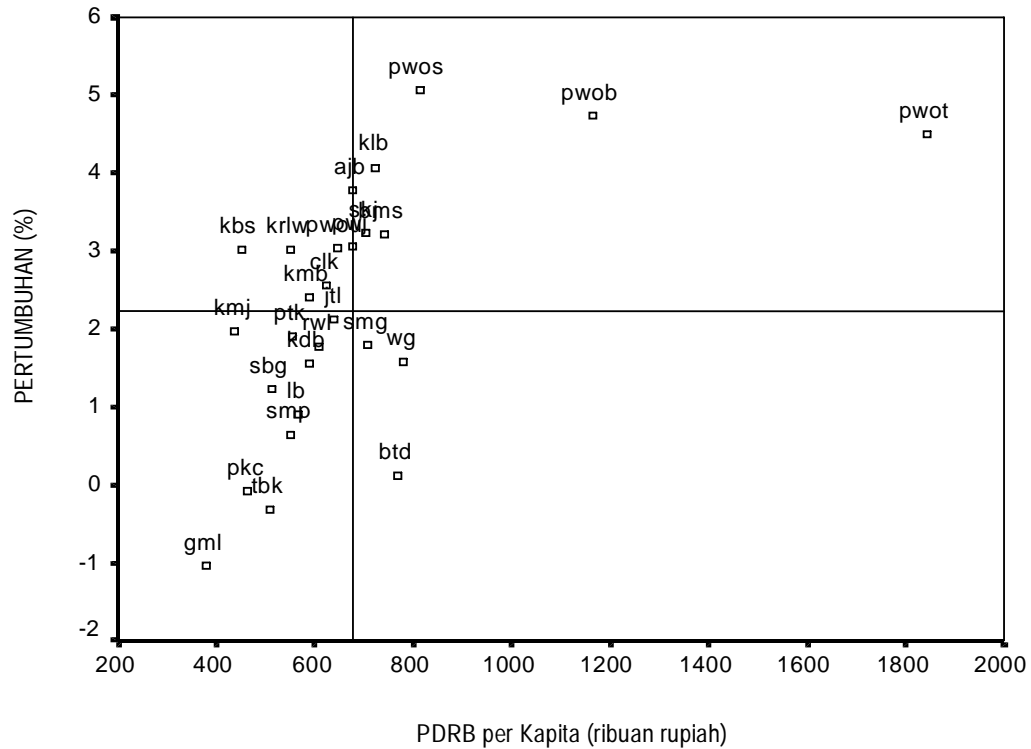
tahun mengalami pertumbuhan yang relatif kecil, akibat tertekannya kegiatan utama kecamatan yang bersangkutan.

Kecamatan Kebasen, Purwojati, Cilongok, Karanglewas, Kembaran dan Purwokerto Utara termasuk kecamatan berkembang cepat. Kecamatan yang termasuk dalam katagori ini adalah kecamatan yang mempunyai potensi yang besar tetapi belum diolah secara baik, sehingga meskipun pertumbuhannya cepat tetapi pendapatannya masih di bawah pendapatan rata-rata kabupaten. Hal ini mengindikasikan bahwa pendapatan kecamatan tersebut masih relatif rendah dibandingkan kecamatan-kecamatan lain, sehingga masa depan harus terus dikembangkan agar memperoleh pendapatan per kapita yang tidak relatif rendah lagi.

Kecamatan Lumir, Jatilawang, Rawalo, Kemranjen, Sumpiuh, Tambak, Patikraja, Gumelar, Pekuncen, Kedungbanteng dan Kecamatan Sumbang termasuk kecamatan relatif tertinggal. Kecamatan-kecamatan yang termasuk dalam katagori ini adalah kecamatan-kecamatan yang secara ekonomis sangat tertinggal, baik dari segi pertumbuhan ekonomi maupun pendapatan per kapita. Dengan kata lain, kecamatan-kecamatan dalam katagori ini adalah kecamatan yang paling buruk keadaannya dibandingkan dengan kecamatan lain di Kabupaten Banyumas.

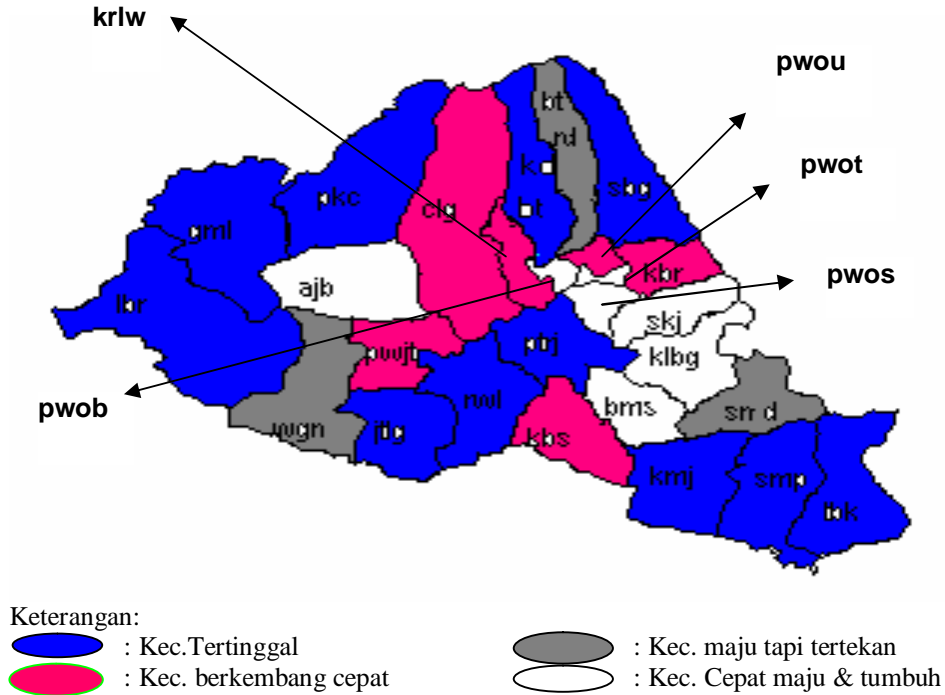
Klasifikasi daerah/kecamatan berdasarkan pendapatan per kapita dan pertumbuhan dapat digambarkan dengan tipologi Klassen, dapat dilihat seperti pada gambar 1 dan 2.

Gambar 1
Pola dan Struktur Perekonomian Kabupaten Banyumas
Menurut Tipologi Klassen, 1993-2000



Sumber : BPS Kab. Banyumas (diolah)
Keterangan

No	Simbol	Kecamatan	No	Simbol	Kecamatan
1	Lb	Lumbir	15	gml	Gumelar
2	Wg	Wangon	16	pkc	Pekuncen
3	Jtl	Jatilawang	17	clk	Cilongok
4	Rwl	Rawalo	18	krlw	Karanglewas
5	Kbs	Kebasen	19	kdb	Kedungbanteng
6	Kmj	Kemranjen	20	btd	Baturaden
7	Smp	Sumpiuh	21	sbg	Sumbang
8	Tbk	Tambak	22	kmb	Kembaran
9	Smg	Somagede	23	skj	Sokaraja
10	Klb	Kalibagor	24	pwos	Purwokerto Selatan
11	Bms	Banyumas	25	pwob	Purwokerto Barat
12	Ptk	Patikraja	26	pwot	Purwokerto Timur
13	Pwj	Purwojati	27	pwou	Purwokerto Utara
14	Ajb	Ajibarang			



Gambar 2
Peta Kabupaten Banyumas berdasar Tipologi Klassen

Kecamatan-kecamatan yang termasuk daerah maju (Purwokerto Timur, Purwokerto Barat, Purwokerto Selatan, Sokaraja, Kalibagor dan Kecamatan Banyumas) terlihat mengumpul pada daerah-daerah yang menjadi pusat pertumbuhan, hanya Kecamatan Ajibarang yang memencar sebagai daerah yang maju, hal tersebut sejalan dengan pendapat Perroux (lihat Arsyad, 1999; 147-148) yaitu bahwa pertumbuhan tidak muncul di berbagai daerah pada waktu yang sama. Pertumbuhan hanya terjadi di beberapa tempat yang merupakan pusat pertumbuhan dengan intensitas yang berbeda seperti pada gambar 2.

Analisis Ketimpangan

Besar kecilnya ketimpangan PDRB per kapita antarkecamatan memberikan

gambaran tentang kondisi dan perkembangan pembangunan di Kabupaten Banyumas. Untuk memberikan gambaran yang lebih baik tentang kondisi dan perkembangan pembangunan daerah di wilayah Kabupaten Banyumas, akan dibahas pemerataan PDRB perkapita antar kecamatan yang dianalisis dengan menggunakan indeks ketimpangan Williamson dan indeks entropi Theil. Angka indeks ketimpangan Williamson semakin kecil atau mendekati nol menunjukkan ketimpangan yang semakin kecil pula atau dengan kata lain makin merata, dan bila semakin jauh dari nol menunjukkan ketimpangan yang semakin melebar.

Tabel 2. Indeks Williamson dan Indeks Entropi Theil Kabupaten Banyumas, 1993–2000

Tahun	Indeks Williamson	Indeks Entropi Theil
1993	0,35	0,032
1994	0,39	0,034
1995	0,40	0,035
1996	0,45	0,041
1997	0,44	0,041
1998	0,43	0,042
1999	0,48	0,046
2000	0,47	0,046
Rata-rata 1	0,426	0,0396
Rata-rata 2	0,691	-

Sumber : BPS Kabupaten Banyumas beberapa terbitan (diolah)

Keterangan :

1. Rata-rata 1 = Rata-rata Indeks Williamson Kabupaten Banyumas.
2. Rata-rata 2 = Rata-rata Indeks Williamson Propinsi Jawa Tengah Periode 1993 - 2000

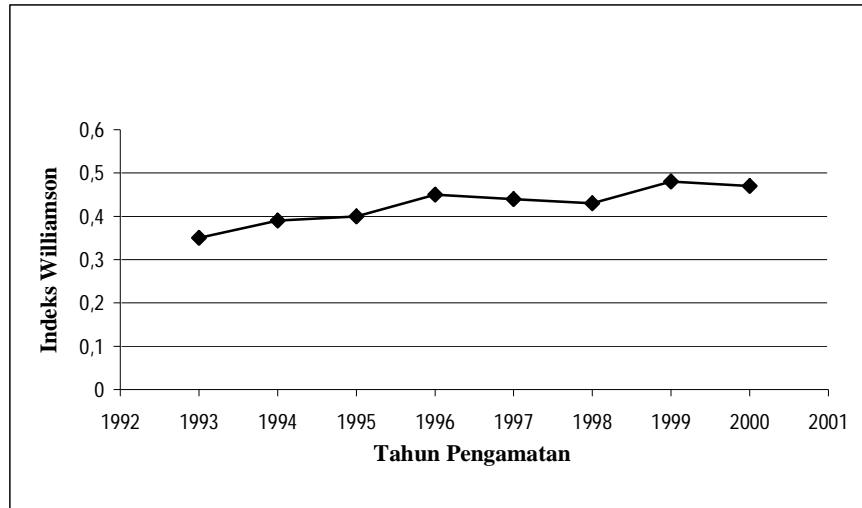
Tabel 2 menunjukkan angka indeks ketimpangan PDRB per kapita antar kecamatan di Kabupaten Banyumas selama periode 1993–2000 yaitu rata-rata 0,426. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan ketimpangan yang terjadi di Propinsi Jawa Tengah yaitu rata-rata 0,691 pada periode yang sama. Angka ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Banyumas PDRB per kapita relatif merata dalam hal pendapatan per kapita bila dibandingkan daerah yang lebih tinggi yaitu Propinsi Jawa Tengah pada periode yang sama.

Ketimpangan antarkecamatan yang terjadi di Kabupaten Banyumas dari tahun 1993 sampai dengan tahun 2000 ada kecenderungan meningkat, misalnya pada tahun 1993 nilai indeks Wiliamson sebesar 0,35 naik menjadi 0,47 pada tahun 2000, hal

tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Setyorini di Propinsi Jawa Tengah tahun 1983–1995.

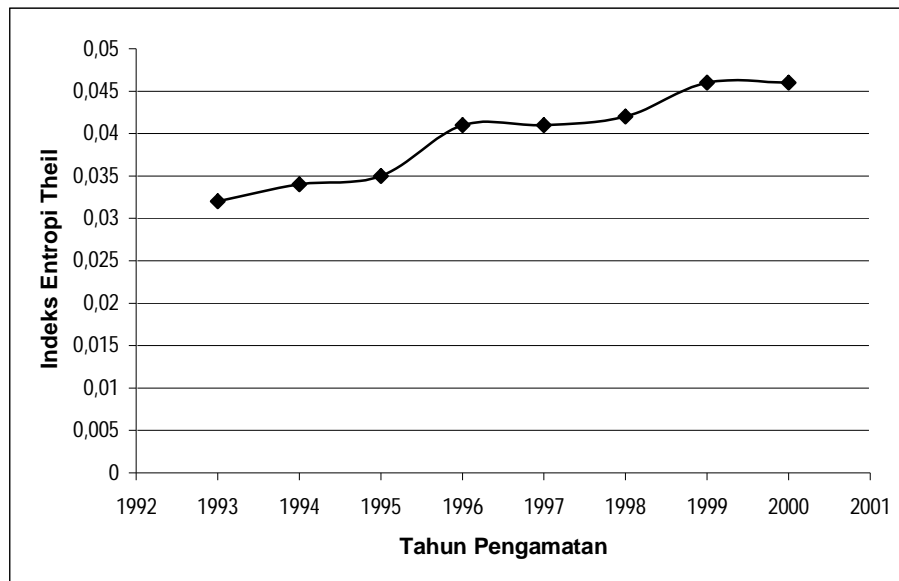
Pada tahun 1998 indeks ketimpangan cenderung menurun dari tahun 1997 yaitu dari 0,44 menjadi 0,43 walaupun pada tahun 1999 ketimpangan naik lagi yaitu menjadi 0,48. Penurunan ketimpangan tersebut disebabkan oleh badai krisis yang menimpa Indonesia yang terasa juga di Kabupaten Banyumas. Daerah yang terkena dampak krisis pada umumnya di daerah perkotaan (daerah yang lebih maju) dan daerah yang bukan perkotaan terkena dampaknya tidak terlalu besar sehingga hal tersebut yang menyebabkan penurunan ketimpangan pada tahun 1998 tersebut. Kecenderungan peningkatan ketimpangan dapat dilihat pada gambar 3.

Gambar 3
Grafik Indeks Williamson Kabupaten Banyumas, 1993–2000



Sumber : tabel 2

Gambar 4
Grafik Indeks Entropi Theil Kabupaten Banyumas, 1993–2000



Sumber : tabel 2

Rendahnya nilai indeks ketimpangan produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita antarkecamatan di Kabupaten Banyumas dibanding indeks ketimpangan Williamson di Propinsi Jawa Tengah tersebut (lihat tabel 2) menunjukkan secara rata-rata tingkat produk domestik regional bruto per kapita antarkecamatan di Kabupaten Banyumas relatif lebih merata. Rendahnya nilai indeks ketimpangan produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita antar-daerah/kecamatan, tidak berarti secara otomatis menerangkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Banyumas lebih baik dibandingkan dengan daerah/kabupaten lain di Propinsi Jawa Tengah. Indeks Williamson hanya menjelaskan distribusi PDRB per kapita antarkecamatan di Kabupaten Banyumas tanpa menjelaskan seberapa besar PDRB per kapita yang didistribusikan tersebut dengan PDRB per kapita rata-rata daerah lain.

Untuk mengetahui besarnya tingkat ketimpangan suatu daerah selain memakai indeks Williamson juga dapat memakai indeks entropi Theil. Indeks entropi Theil pada dasarnya merupakan aplikasi konsep teori informasi dalam mengukur ketimpangan ekonomi dan konsentrasi industri (Kuncoro; 2001: 87).

Dari hasil analisis didapatkan nilai indeks entropi Theil periode tahun 1993–2000 rata-rata sebesar 0,0396 lihat tabel 2. Seperti pada indeks Williamson indeks entropi Theil juga terjadi kecenderungan peningkatan ketimpangan dari tahun 1993 sampai tahun 2000, di mana pada tahun 1993 nilai indeks entropi Theil sebesar 0,032 dan pada tahun 2000 meningkat menjadi sebesar 0,046.

Indeks entropi Theil semakin membesar berarti menunjukkan ketimpangan yang semakin membesar, bila indeksnya semakin kecil maka ketimpangan akan semakin rendah/kecil pula atau dengan kata lain semakin merata. Hal tersebut sejalan dengan

indeks ketimpangan Williamson. Indeks ketimpangan entropi Theil tidak memiliki batas atas atau batas bawah, hanya apabila semakin besar nilainya maka semakin timpang dan semakin kecil semakin merata. Gambar yang menunjukkan kecenderungan peningkatan ketimpangan dapat juga dilihat seperti pada gambar 4.

Apakah Hipotesis Kuznets Berlaku di Kabupaten Banyumas?

Dari gambar 3 dan 4 tersebut didapatkan hasil baik indeks Williamson maupun indeks entropi Theil menunjukkan terjadi kecenderungan peningkatan ketimpangan di Kabupaten Banyumas dalam periode penelitian. Kecenderungan peningkatan tersebut belum membuktikan berlakunya hipotesis Kuznets di Kabupaten Banyumas.

Hipotesis Kuznets dapat dibuktikan dengan membuat grafik antara pertumbuhan produk domestik regional bruto dan indeks ketimpangan. Grafik tersebut merupakan hubungan antara pertumbuhan PDRB dengan indeks ketimpangan Williamson maupun pertumbuhan PDRB dengan indeks ketimpangan entropi Theil pada periode pengamatan.

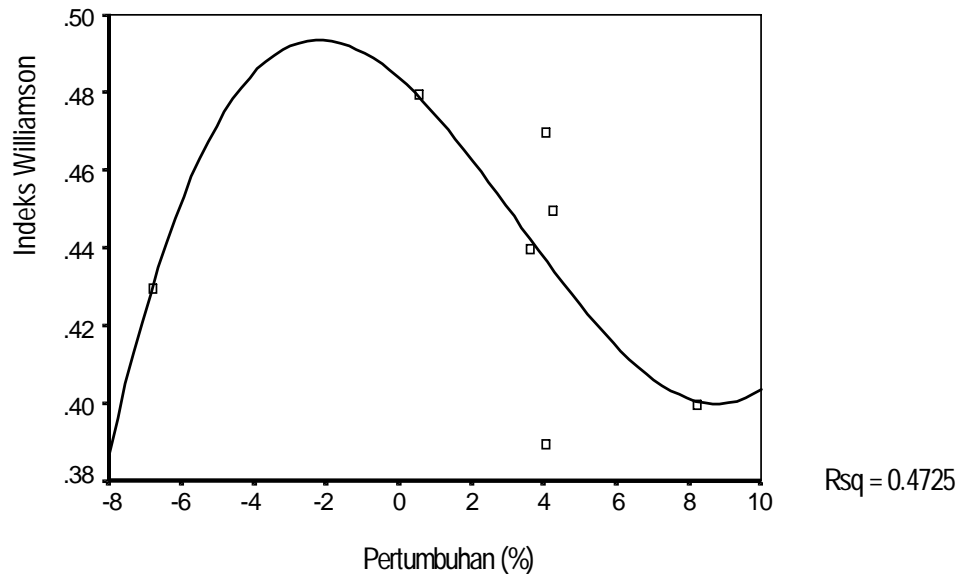
Gambar 5 dan 6 merupakan hubungan antara indeks ketimpangan dan pertumbuhan PDRB. Kurva tersebut (lihat gambar 5 dan 6) menunjukkan berbentuk U terbalik, pada pertumbuhan awal ketimpangan memburuk dan pada tahap-tahap berikutnya ketimpangan menurun, namun pada suatu waktu akan terjadi peningkatan ketimpangan lagi dan akhirnya akan menurun lagi sehingga dapat dikatakan peristiwa tersebut seperti berulang kembali. Kurva yang berbentuk kecenderungan U terbalik itu menunjukkan bahwa hipotesis Kuznets dapat dikatakan berlaku di Kabupaten Banyumas.

Dari hasil analisis korelasi (korelasi Pearson) antara pertumbuhan PDRB dan indeks Williamson dan indeks entropi Theil

didapatkan nilai -0,24 dan -0,422 (lihat tabel 3 dan 4). Nilai negatif tersebut barangkali tidak konsisten dengan gambar 5 dan 6. Korelasi Pearson menunjukkan trend linear, pada pada gambar 5 dan 6 kurvanya ber-

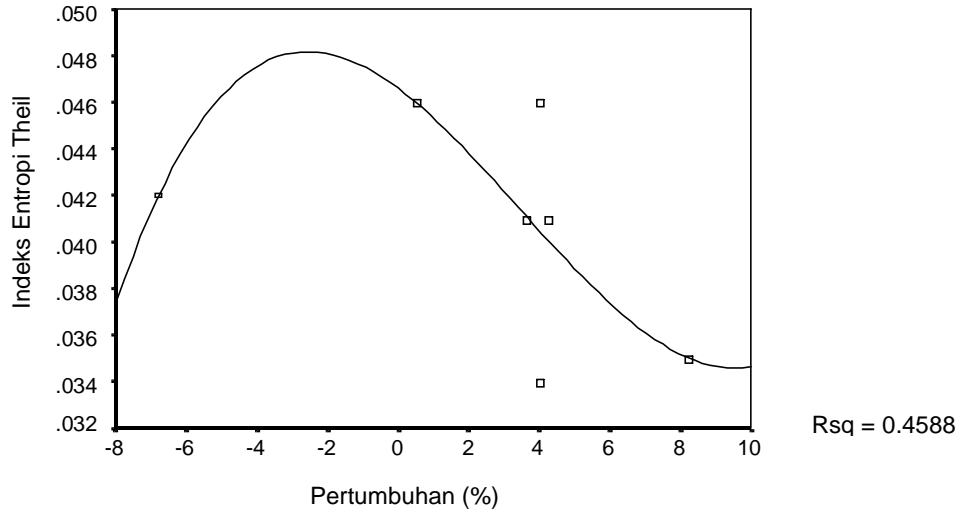
bentuk non linear. Kendati demikian, hasil korelasi ini kurang kuat secara statistik karena terbukti tidak signifikan pada $\alpha = 10\%$.

Gambar 5
Kurva Hubungan antara Indeks Williamson dengan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Banyumas, 1994-2000.



Keterangan : □ data aktual
— Garis trend linear
Sumber : data diolah dari tabel 2

Gambar 6.
Kurva Hubungan antara Pertumbuhan dan Indeks Entropi Theil
Kabupaten Banyumas, 1994-2000



Sumber : data diolah dari tabel 3.3

Keterangan : □ data aktual

_ Garis trend linear

Tabel 3. Korelasi Pearson antara Pertumbuhan dan Indeks Williamson
serta Indeks Entropi Theil

		IW	R		IET	r
Korelasi	IW	1,00	- 0,24	IET	1,0	- 0,422
	r	- 0,24	1,00	R	- 0,422	1,00
Signifikansi	IW	-	0,302	IET	-	0,173
	r	0,302	-	R	0,173	-

Sumber : data diolah dari tabel 2

Keterangan: IW = indeks Williamson

r = pertumbuhan PDRB

IET= indeks entropy Theil

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian dan pembahasan terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan antar kecamatan di Kabupaten Banyumas, 1993–2000 adalah sebagai berikut.

1. Berdasarkan tipologi Klassen, daerah/kecamatan di Kabupaten Banyumas dapat diklasifikasikan berdasarkan pertumbuhan dan pendapatan per kapita menjadi empat kelompok yaitu daerah/kecamatan cepat maju dan cepat tumbuh, kecamatan yang maju tapi tertekan, kecamatan/daerah yang berkembang cepat dan kecamatan/daerah tertinggal.

2. Pada periode pengamatan 1993–2000 terjadi kecenderungan peningkatan ketimpangan, baik dianalisis dengan indeks Williamson maupun dengan indeks entropi Theil. Ketimpangan ini salah satunya diakibatkan konsentrasi aktivitas ekonomi secara spasial.
3. Hipotesis Kuznets mengenai ketimpangan yang berbentuk kurva U terbalik berlaku di Kabupaten Banyumas, ini terbukti dari hasil analisis trend dan korelasi Pearson. Hubungan antara pertumbuhan dengan indeks ketimpangan Williamson dan entropi Theil untuk kasus Kabupaten Banyumas selama periode 1993–2000 terbukti berlaku hipotesis Kuznets.

Implikasi Kebijakan

Berdasarkan dari ketiga kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas guna mengurangi ketimpangan yang semakin melebar. Salah satu kebijakan yang dapat ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas yaitu dalam perencanaan pembangunan agar diarahkan/diprioritaskan bagi daerah-daerah yang relatif tertinggal dengan tidak melupakan daerah yang lain. Dalam mengambil kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten harus berdasar pembangunan yang berdasarkan spasial tidak seperti pada waktu sebelumnya yang menggunakan pendekatan a-spasial.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardani, Amirudin. 1992, "Analisis of Regional Growth and Disparity: the Impact Analysis of The Project on Indonesian Development", *Ph.D. Dissertation City and Regional Planning*, University of Pennsylvania Philadelphia, USA (tidak dipublikasikan).
- Arsyad, Lincolin, 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, BPFE, Jogjakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, *Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) beberapa terbitan*, BPS Banyumas, Purwokerto.
- Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, *Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) beberapa terbitan*, BPS Jawa Tengah, Semarang.
- Boediono, 1985, *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, BPFE, Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2001. *Analisis Spasial dan Regional*, UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2001. *Metoda Kuantitatif*, UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Kuncoro, M dan Aswandi, H. 2002. "Evaluasi Penetapan Kawasan Andalan: Studi Empiris di Kalimantan Selatan 1993 – 1999", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 17, No. 1. 27 – 45. UGM, Jogjakarta.
- Majidi, Nasyith. 1997. "Anggaran Pembangunan dan Ketimpangan Ekonomi antar Daerah", *Prisma*, LP3ES No. 3; 3 – 16.
- Pusat Penelitian Perencanaan Pembangunan Nasional. 1997. *Evaluasi Paruh Waktu Pelita VI Daerah Tingkat I Jawa Tengah*, Semarang: Bekerjasama dengan Bappeda Tingkat I Jawa Tengah.

- Setyarini, Djati. 1999, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesenjangan Pembangunan Ekonomi antar Daerah di Propinsi Jawa Tengah”, *Tesis S-2 Program Pascasarjana, UGM*, tidak dipublikasikan.
- Sjafrizal, 1997, “Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat”, *Prisma*, LP3ES, Nomor 3, 27-38.
- Sukirno, Sadono, 1985, *Ekonomi Pembangunan*, LPFE UI, Jakarta.
- Todaro, Michael, P., 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Edisi Ketujuh (diterjemahkan oleh Haris Munandar), Jakarta: Erlangga.
- Ying, Long,G. 2000. “China’s Changing Regional Disparities during the Reform Period”, *Economic Geography*, Vol. XXIV No. 7. 59-70.